

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan hal-hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, baik yang merupakan satuan kerja pemerintah pusat dan daerah melalui dana dekonsentrasi.

#### 6.1 Kesimpulan

1. Perencanaan memiliki peranan yang penting dalam menyukseskan suatu kegiatan atau program. Dalam siklus anggaran perencanaan berpengaruh terhadap proses siklus anggaran baik anggaran, pengawasan dan pelaporan. Revisi yang dilakukan oleh internal maupun eksternal dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Dalam kurun waktu 4 tahun ke belakang dana yang belum terserap cukup besar. Selain revisi, peranan sumber daya manusia dan penjadwalan perencanaan turut mempengaruhi penyerapan anggaran.
2. Pengawasan yang dilakukan belum maksimal masih terbatas pada akhir anggaran bukan pada awal anggaran.
3. Pelaporan yang dilakukan belum maksimal dan terintegrasi satu sama yang lain. Tidak terdapat sanksi yang jelas bila tidak memberikan laporan.

#### 6.2 Saran

1. Perencanaan yang dilakukan hendaknya benar-benar sudah matang adanya dan diberlakukan penelitian awal, sehingga walaupun terjadi revisi tidak dilakukan berkali-kali perubahan atau revisi. Ada faktor dari luar yang memaksa hal itu terjadi, misal karena krisis ekonomi dunia mempengaruhi perencanaan. Kebijakan pelaksanaan anggaran di masa yang akan datang menggunakan pendekatan *New Public Management* (NPM). Kinerja

anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran yang tinggi seperti saat ini.

2. Pengawasan yang dijalankan oleh pimpinan unit kerja dan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dilakukan sejak perencanaan berlangsung. Ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kegagalan suatu kegiatan. Unit kerja dapat membuat satuan yang mengawasi lajunya kegiatan internal di unit kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebijakan pembentukan Satuan Pengawasan Intern di setiap satuan kerja menjadi alternatif sehingga membantu Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
3. Pelaporan menjadi lebih mudah dengan mengintegrasikan laporan keuangan dan kinerja dalam pembuatan. Satuan kerja pemerintah pusat dan daerah yang tidak membuat laporan mendapatkan sanksi sesuai kebijakan yang akan diambil dalam pembuatan aturan sanksi nantinya.